

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Blora dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Blora

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dalam Penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini di analisis menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori Otonomi Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora adalah lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan manajemen lingkungan di seluruh Kabupaten Blora melalui atribusi yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih terkesan normatif. Ini disebabkan oleh kewenangan yang diberikan tidak seperti di era orde baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini adalah pelaksana pemerintahan daerah yang sejajar dengan kepala daerah. Dalam prakteknya kepala daerah lebih dominan untuk urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya DPRD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala antara lain adalah sebagian besar inisiatif perda berasal dari eksekutif, kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah, kurang jelasnya kriteria pengawasan terhadap eksekutif. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora harus meningkatkan sumber daya manusia terkait masalah *legal drafting*, anggaran, dan penguasaan daerah terutama daerah pilihannya (dapil) anggota dewan yang bersangkutan.

**Kata kunci: Tugas dan Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah.**

## ***ABSTRACT***

The formulation of the problem in this research is the duties and functions of the Regional People's Representative Council in improving the people's welfare as the embodiment of Regional Autonomy, the implementation of the tasks and functions of the Regional People's Representative Council in improving the people's welfare as the embodiment of Regional Autonomy in Blora Regency and the obstacles and solutions in the implementation of tasks and functions. Regional People's Representative Council in improving people's welfare as a manifestation of Regional Autonomy in Blora Regency

The approach method that will be used in this research is the sociological juridical approach. This type of research is descriptive analysis, research that seeks to describe and analyze a phenomenon, event, event that is happening now. This research was analyzed using the theory of popular sovereignty and the theory of regional autonomy.

Based on the results of this study is the Regional Representative Council of Blora Regency is an institution intended to carry out environmental management in all Blora Regencies through attribution that has been regulated in the legislation. In carrying out its duties and functions, the Blora Regency Regional People's Representative Council is in accordance with applicable regulations, but it still seems normative. This is caused by the authority given unlike in the New Order era. The Regional House of Representatives is currently implementing the regional government which is in line with the regional head. In practice the regional head is more dominant in the affairs of government and regional autonomy. In carrying out its duties, authority, and functions in Blora Regency, there are several obstacles including the majority of local regulations originating from the executive, lack of understanding of regional issues, lack of clarity about executive oversight criteria. The solution is that the Blora Regency Regional House of Representatives must increase human resources related to legal drafting, budgeting, and regional control issues, especially in their chosen regions (electoral districts).

**Keywords: Duties and Functions, Regional People's Representative Council, Regional Autonomy.**